

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas dan temuan peneliti dilapangan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut belum berjalan dengan baik. Mengacu pada standar dan sasaran kebijakan, sudah adanya kejelasan dalam tujuan yang akan dicapai, dan target capaian dari kebijakan tersebut sudah ditentukan. Namun dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting, belum semua masyarakat yang menjadi target sasaran dari kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok.

Mengacu kepada sumber daya manusia yang ada terdapat kendala dalam ketersediaan sumber daya manusia yang belum mencukupi untuk melaksanakan kebijakan penurunan stunting, namun dapat ditutupi dengan kualitas sumber daya manusianya. Masih terdapat kendala dalam segi anggaran yang berdampak pada banyaknya target sasaran dari kebijakan tersebut. Namun dari segi ketersediaan sumber daya waktu, bisa dikatakan adanya waktu yang disediakan oleh implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Hubungan antar implementor kebijakan penurunan stunting sudah berjalan dengan baik. Namun koordinasi yang ada hanya melalui rapat-rapat saja, sehingga bisa dikatakan organisasi perangkat daerah yang terlibat bekerja sendiri-sendiri berdasarkan perannya masing-masing. Sikap para implementor juga menerima

kebijakan tersebut, bahkan menjadi salah satu prioritas di Kabupaten Solok dibuktikan dengan penurunan stunting masuk kedalam salah satu visi dan misi Kabupaten Solok. Disamping itu faktor ekonomi, sosial, dan politik memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Adanya penerimaan yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut, namun ada beberapa masyarakat yang acuh atau tidak peduli dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut. Dalam lingkungan ekonomi, saat ini Kabupaten Solok berada pada kondisi kemiskinan ekstrem yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan. Namun dari segi lingkungan politik, adanya dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti ingin memberikan saran terkait implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan implementor dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting
2. Perlu adanya dukungan anggaran dalam melaksanakan kebijakan penurunan stunting sehingga semua implementor yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dan masyarakat sebagai target sasaran dapat merasakan manfaatnya

3. Implementor kebijakan penurunan stunting lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting sehingga tidak adanya sikap acuh atau tidak peduli dari masyarakat dalam upaya penurunan stunting
4. Adanya penanganan tambahan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh kepada penurunan angka stunting di Kabupaten Solok.
5. Seharusnya dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan di Tim Koordinator Penurunan Stunting Kabupaten Solok harus dilakukan secara collaborative governance tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati terkait Tim Koordinator Penurunan Stunting.
6. Proses perevisian kebijakan Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting harus dipercepat sehingga kebijakan yang akan dijalankan mengacu kepada standar kebijakan nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

